

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERI KERJA ATAS HAK CUTI HAID PADA PEKERJA PEREMPUAN DI BANYUMAS**

**Oleh:**

**Bella Suci Afitasari**

**E1A017198**

Hak cuti haid adalah hal yang kerap kali dilupakan oleh perusahaan untuk diberikan kepada pekerja perempuan. Hukum ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi serangkaian aturan yang mendukung dan menjamin hak-hak pekerja perempuan di tengah minimnya pengetahuan akan hak-hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Penulis juga menggunakan sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum dan kepustakaan serta melakukan wawancara dengan beberapa tenaga kerja wanita di Banyumas. Hasil dari penelitian ini adalah masih ada pekerja perempuan yang tidak mendapatkan haknya berupa cuti haid, namun demikian, beberapa Perusahaan di Banyumas telah mendapatkan hak tersebut melalui perjanjian kerja. Selain itu, bentuk tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal cuti haid adalah dengan memberikan hak tersebut kepada pekerja perempuan.

**Kata Kunci:** Cuti haid, Pekerja perempuan, Ketenagakerjaan, Pertanggungjawaban

## **ABSTRACT**

### **PROTECTION AND LIABILITY OF EMPLOYERS FOR MENSTRUAL LEAVE RIGHTS OF FEMALE WORKERS IN BANYUMAS**

**By:**  
**Bella Suci Afitasari**  
**E1A017198**

*Menstrual leave rights are often overlooked by companies and not granted to female workers. Labor law is expected to be a tool that supports and guarantees the rights of female workers amidst their lack of knowledge about these rights. The study employs a normative juridical method, a statutory approach, and an analytical approach. The author also uses secondary legal sources consisting of primary legal materials such as the Employment Law through the collection of legal materials using legal methods and library research, as well as conducting interviews with several female workers in Banyumas. The results of this study are that there are still female workers who do not receive their menstrual leave rights, however, the informants interviewed by the author themselves have received these rights through employment contracts. In addition, the form of legal responsibility carried out by companies regarding menstrual leave is by granting this right to female workers.*

**Keyword:** Menstrual leave, Women workers, Employment, Liability